

	Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal
--	---

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal Triwulan I Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulanan 2026	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)
I	<i>Sasaran Program 1. Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal yang Berkualitas</i>					
1.1	Indikator 1.1 Persentase Efektifitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan untuk <i>Investor Relation Unit</i> (IRU) dan <i>Recent Economic Development</i> (RED)	Persentase	100%	25%	25%	100%
1.2	Indikator 1.2 Persentase Efektifitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Diagnosa Ekonomi Makro dan Ketahanan Fiskal	Persentase	100%	25%	30%	120%
II	<i>Sasaran Program 2. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal</i>					
2.1	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	100%
III.	<i>Sasaran Program 3. Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal yang Profesional</i>					
3.1	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal	Persentase	92%	20%	20%	100%

Kinerja Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1	Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal yang Berkualitas
----------	---

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Terwujudnya kebijakan Bidang Perekonomian yang efektif merupakan sasaran strategis perspektif internal *business process* yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif stakeholder yang ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Efektifitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan untuk *Investor Relation Unit* (IRU) dan *Recent Economic Development* (RED); dan
2. Persentase Efektifitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Diagnosa Ekonomi Makro dan Ketahanan Fiskal.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1.1. Persentase Efektifitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan untuk Investor Relation Unit (IRU) dan Recent Economic Development (RED)

Latar Belakang

Terwujudnya kebijakan Bidang Perekonomian yang efektif merupakan sasaran strategis perspektif internal *business process* yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif *stakeholder*. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mencakup: a) penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang ekonomi makro, ekonomi daerah dan fiskal; b) perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang ekonomi makro, ekonomi daerah dan fiskal; c) pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang ekonomi makro, ekonomi daerah dan fiskal; d) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ekonomi makro, ekonomi daerah dan fiskal; dan e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh deputi.

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan dan rumusan kebijakan yang terkait melalui dokumen yang relevan.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

Tahapan Pertama: Perencanaan Kebijakan

Tahapan Pertama: Perencanaan kebijakan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah kebijakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab permasalahan publik secara efektif serta selaras dengan prioritas pembangunan.

Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir Rapat terkait Perencanaan Kebijakan;
- Notula/ Risalah/ Berita acara terkait Perencanaan Kebijakan;
- Kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan;
- Naskah Urgensi;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Konsep Alternatif Kebijakan dan Program;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:

- IRU Triwulan I (Januari-Maret) yang difokuskan pada pembahasan mengenai *Macroeconomic Sector*;
- RED Triwulan I (Januari-Maret) yang difokuskan pada perkembangan ekonomi global dan perdagangan Internasional;
- Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan FGD terkait Strategi Perdagangan Indonesia di Tengah Kebijakan Perdagangan Global;
- Beberapa isu ataupun substansi terkait perkembangan ekonomi global dan domestik, prospek dan tantangan perekonomian, strategi kebijakan, dan/atau substansi lainnya;
- Penyusunan laporan pasar harian mencakup rangkuman data dan informasi harian terkait kondisi pasar keuangan, berita terkini, kalender ekonomi, dan rilis data Indonesia dan global.

Tahapan Kedua: Implementasi Kebijakan

Tahapan Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Tahap ini berfokus pada penerjemahan kebijakan ke dalam program, kegiatan, dan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh unit atau pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumber daya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan perencanaan program;
- Memo Kebijakan;
- Juklak/Juknis;

- Kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan implementasi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:

- IRU Triwulan II (April-Juni) yang difokuskan pada pembahasan mengenai *Real Sector & Investment Environment*;
- RED Triwulan II (April-Juni) yang difokuskan pada Ketahanan Sektor Eksternal di awal tahun 2026;
- Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan FGD terkait Dinamika Geopolitik dan Geoekonomi Global
- Beberapa isu ataupun substansi yang akan dibahas antara lain terkait perkembangan ekonomi global dan domestik, prospek dan tantangan perekonomian, strategi kebijakan, dan/atau substansi lainnya.
- Penyusunan laporan pasar harian mencakup rangkuman data dan informasi harian terkait kondisi pasar keuangan, berita terkini, kalender ekonomi, dan rilis data Indonesia dan global.

Tahapan Ketiga: Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan

Pada tahapan ini, evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta mengidentifikasi kendala, risiko, dan area perbaikan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menjamin keberlanjutan kebijakan, yaitu upaya untuk memastikan kebijakan dapat dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan manfaat jangka panjang melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan);
- Memo Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan.

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:

1. IRU Triwulan III (Juli-September) yang difokuskan pada pembahasan mengenai *Financial & External Sector*; dan
2. RED Triwulan III (Juli-September) yang difokuskan pada investasi.

3. Beberapa isu ataupun substansi yang akan dibahas antara lain terkait perkembangan ekonomi global dan domestik, prospek dan tantangan perekonomian, strategi kebijakan, dan/atau substansi lainnya.
4. Penyusunan laporan pasar harian mencakup rangkuman data dan informasi harian terkait kondisi pasar keuangan, berita terkini, kalender ekonomi, dan rilis data Indonesia dan global.

Tahapan Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik

Pada tahapan ini transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan, sementara partisipasi publik mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna memberikan masukan, aspirasi, dan perspektif yang beragam dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan serta memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Memo Kebijakan;
- Rancangan Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:

1. IRU Triwulan IV (Oktober – Desember) yang difokuskan pada pembahasan mengenai *Economic Structural Reform & Transformation*;
2. RED Triwulan IV (Oktober – Desember) yang difokuskan pada Strategi kebijakan Pemerintah; dan
3. Beberapa isu ataupun substansi yang akan dibahas antara lain terkait perkembangan ekonomi global dan domestik, prospek dan tantangan perekonomian, strategi kebijakan, dan/atau substansi lainnya.
4. Penyusunan laporan pasar harian mencakup rangkuman data dan informasi harian terkait kondisi pasar keuangan, berita terkini, kalender ekonomi, dan rilis data Indonesia dan global.

1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

$$\text{Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$\text{Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

$$\text{Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

$$\text{Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan untuk *Investor Relation Unit* (IRU) dan *Recent Economic Development* (RED)

$$\% \text{ efektivitas SKP} = \% \text{ Tahapan Pertama} + \% \text{ Tahapan Kedua} + \% \text{ Tahapan Ketiga} + \% \text{ Tahapan Keempat}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Persentase Efektifitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan untuk *Investor Relation Unit* (IRU) dan *Recent Economic Development* (RED)

Perhitungan persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan untuk IRU dan RED dilakukan setiap triwulan. Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada perkiraan dan target kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2026. Adapun target triwulan I tahun 2026 sebesar 25%.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Persentase Efektifitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan untuk IRU dan RED yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 100% atau mencapai 25% dari target Tahun 2026 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1 Persentase Efektifitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan untuk <i>Investor Relation Unit</i> (IRU) dan <i>Recent Economic Development</i> (RED)	Persentase	100%	25%	100%

Investor Relation Unit (IRU)

Penyusunan *Presentation Book* (PB) IRU berfokus untuk menjadi penghubung komunikasi antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan para investor, analis, dan pemangku kepentingan lainnya. PB IRU berperan strategis dalam memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan pemerintah dipahami dengan benar oleh pemangku kepentingan dan sesuai dengan harapan dan kebutuhan investor. PB IRU telah di publikasi secara rutin dalam website Kemenko Bidang Perekonomian sehingga bisa diakses oleh masyarakat umum, selain itu PB IRU ini juga disampaikan secara rutin kepada Bank Indonesia untuk kebutuhan publikasi Bank Indonesia. Pada PB IRU pada triwulan I tahun 2026 terdapat kebijakan-kebijakan yang banyak dikeluarkan pada masa awal pemerintahan, seperti: Asta Cita (8 Program Prioritas 2025 – 2029), Visi Indonesia Emas 2025 – 2045, dan Paket Stimulus Ekonomi tahun 2026. Realisasi kinerja Asisten Deputi

Ekonomi Makro dan Fiskal selama triwulan I tahun 2026, utamanya dalam hal penyusunan PB IRU terselenggara melalui:

1. Koordinasi Materi PB IRU

- Koordinasi dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Nomor: EK.02/23/D.II.M.EKON.6/01/2025, tanggal 24 Januari 2025, perihal “Permohonan Update Kebijakan”, yang disampaikan kepada unit-unit Asisten Deputi di Kemenko Perekonomian yang berkaitan erat dengan kebijakan investasi.
- Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal juga berkoordinasi dengan KL terkait dalam menghimpun data dan informasi tambahan yang akan disajikan.
- Selanjutnya, koordinasi dilakukan secara informal antara Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal dengan unit-unit terkait.

2. Penyusunan PB IRU

- PB IRU selalu terdiri dari 2 bagian utama, yaitu analisa makroekonomi dan kebijakan reformasi struktural.
- Pada bagian analisa makroekonomi, dilakukan perhitungan dan analisa untuk data PDB dan inflasi secara global. Sedangkan pada data makroekonomi Indonesia, dilakukan perhitungan dan analisa untuk data investasi, indeks keyakinan konsumen, cadangan devisa, dan perdagangan.
- Pada bagian kebijakan reformasi struktural, menyampaikan isu-isu yang dianggap menjadi perhatian investor, seperti paket kebijakan ekonomi, kebijakan dalam pengendalian inflasi, kebijakan fiskal, kebijakan ekspor & impor, kebijakan investasi, kebijakan ekonomi digital, kebijakan tenaga kerja, kebijakan hubungan luar negeri, PSN, kebijakan hilirisasi, dan kebijakan ekonomi hijau.
- Dalam perkembangannya, Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal menganalisa isu-isu yang relevan untuk dipertahankan atau ditambahkan pada PB IRU dan mengurangi isu yang sudah tidak menjadi perhatian.

Recent Economic Development (RED)

Penyusunan RED/Perkembangan Ekonomi Terkini merupakan publikasi rutin yang idealnya dilakukan secara bulanan untuk menyajikan rangkuman data, informasi, dan analisis mengenai perkembangan perekonomian Indonesia dan global serta mengkomunikasikan strategi dan kebijakan Pemerintah Indonesia terkini. Selama triwulan I telah dilakukan penyusunan RED Triwulan 1 sebanyak 1 edisi (bulan Maret), sedangkan pada bulan Januari belum dilakukan penyusunan karena masih dalam tahap perencanaan dan koordinasi untuk permintaan kerjasama dengan unit eselon II terkait di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mendukung materi substansi kebijakan dan data relevan untuk nantinya disusun menjadi RED. Adapun RED tersebut juga telah disampaikan kepada Bapak Menko Perekonomian dan disebarkan kepada unit eselon II di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai referensi dan informasi perkembangan ekonomi terkini. Selain itu, RED ini juga

telah di publikasikan dalam website Kemenko Bidang Perekonomian dan bisa diakses oleh masyarakat luas.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.1 Persentase Efektifitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan untuk <i>Investor Relation Unit</i> (IRU) dan <i>Recent Economic Development</i> (RED)			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Koordinasi IRU dan Penyusunan Laporan bulanan <i>Presentation Book</i> IRU (edisi Januari, Februari, dan Maret) yang difokuskan pada pembahasan mengenai <i>Macroeconomic Sector</i>	Terlaksana	<i>Presentation Book</i> IRU edisi Januari–Maret 2026 telah disusun, dipublikasikan melalui website Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Bank Indonesia serta didistribusikan kepada para pemangku kepentingan terkait.
2.	Koordinasi dan Penyusunan laporan RED Triwulan I yang difokuskan pada perkembangan ekonomi global dan perdagangan internasional	Terlaksana	RED Triwulan I (edisi Maret 2026) telah disusun, dipublikasikan melalui website Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan didistribusikan kepada para pemangku kepentingan terkait.
3.	Pelaksanaan FGD terkait Strategi Perdagangan Indonesia di Tengah Kebijakan Perdagangan Global	Terlaksana	FGD telah dilaksanakan pada 19 Februari 2026 dengan mengundang stakeholders terkait.

Upaya Nyata

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk percepatan pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *capacity building* dan *focus group discussion* (FGD) dalam rangka pembinaan peningkatan kemampuan analisa perkembangan ekonomi makro dan kebijakan fiskal, terutama yang berhubungan dengan dinamika ekonomi terkini.
2. Penyampaian data perkembangan ekonomi terkini berupa PB IRU dan RED kepada Bapak Menko Perekonomian dan para eselon 1 di lingkup Kemenko Bidang Perekonomian serta PB IRU kepada Bank Indonesia.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya rapat dilaksanakan menggunakan *zoom meeting* dengan mengundang narasumber yang ahli dibidangnya sehingga menambah ilmu dan wawasan bagi para pegawai di lingkup Asdep Ekonomi Makro dan Fiskal. Selain itu, penyimpanan dan dokumen serta keperluan administrasi persuratan menggunakan e-dokumen, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp19.920.000,-. Untuk pemberian manfaat yang lebih besar kepada K/L, swasta, akademisi, dan masyarakat umum, maka publikasi IRU dan RED akan kami usulkan untuk dapat masuk pada website resmi Kemenko Bidang Perekonomian dengan harapan data dan informasi yang telah kami susun ini dapat diakses dengan lebih mudah dan cepat oleh berbagai pihak.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Belum dapat dialokasikannya anggaran untuk perpanjangan langganan Bloomberg dan *China Economic Information Center* (CEIC) di unit Kedeputan Ekonomi Makro dan Fiskal menyebabkan proses penyusunan RED dan IRU menjadi lebih lama. Hal ini karena akses Bloomberg dan CEIC masih menggunakan fasilitas milik Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama (MKKS) secara remote dan harus digunakan secara bergantian, sehingga mengurangi efisiensi serta berpotensi menghambat kelancaran penyusunan dokumen.
2. PB IRU dan RED telah dipublikasikan, namun proses pembaruan beberapa bagian masih bergantung pada data dan materi dari unit lain, sehingga pemutakhiran dokumen belum selalu dapat dilakukan secara tepat waktu.

Rumusan rekomendasi/upaya perbaikan demi tercapainya target kinerja

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Mengalokasikan anggaran perpanjangan langganan Bloomberg dan CEIC pada unit Keasdepan Ekonomi Makro dan Fiskal untuk mendukung kelancaran penyusunan RED dan IRU.
2. Memperkuat koordinasi serta menetapkan mekanisme dan jadwal penyampaian data dengan unit terkait agar pembaruan PB IRU dan RED dapat dilakukan secara tepat waktu.

1.2.1. Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Ekonomi Makro dan

Latar Belakang

Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang ekonomi makro dan fiskal yang berkualitas merupakan sasaran strategis perspektif internal *business process* yang menjadi sarana terwujudnya sasaran strategis perspektif stakeholder. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mencakup:

Fiskal yang Berkualitas

a) penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang ekonomi makro, ekonomi daerah dan fiskal; b) perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang ekonomi makro, ekonomi daerah dan fiskal; c) pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang ekonomi makro, ekonomi daerah dan fiskal; d) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ekonomi makro, ekonomi daerah dan fiskal; dan e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh deputi.

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Perencanaan Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan, dan Transparansi dan Partisipasi Publik. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya **rumusan perencanaan program dan rumusan kebijakan yang terkait (data analisis, policy brief, dan dokumen lain yang relevan)**.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

Tahapan Pertama: Perencanaan Kebijakan

Tahapan Pertama: Perencanaan kebijakan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah kebijakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab permasalahan publik secara efektif serta selaras dengan prioritas pembangunan.

Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir Rapat terkait Perencanaan Kebijakan;
- Notula/ Risalah/ Berita acara terkait Perencanaan Kebijakan;
- Kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan;
- Naskah Urgensi;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Konsep Alternatif Kebijakan dan Program;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:

- Diagnosa Ekonomi Makro terkait perdagangan internasional dan investasi;
- Ketahanan Fiskal terkait belanja negara;
- Beberapa isu ataupun substansi yang akan dibahas antara lain terkait arah kebijakan fiskal Indonesia, realisasi dan proyeksi APBN, stabilitas utang dan kebutuhan pembiayaan, kerentanan fiskal dan faktor risiko, investasi, dan/atau substansi lainnya.

Tahapan Kedua: Implementasi Kebijakan

Tahapan Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Tahap ini berfokus pada penerjemahan kebijakan ke dalam program, kegiatan, dan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh unit atau pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing.

Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumber daya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan perencanaan program;
- Memo Kebijakan;
- Juklak/Juknis;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan implementasi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:

- Diagnosa Ekonomi Makro terkait perdagangan internasional;
- Ketahanan Fiskal terkait pembiayaan;
- Beberapa isu ataupun substansi yang akan dibahas antara lain terkait arah kebijakan fiskal Indonesia, realisasi dan proyeksi APBN, stabilitas utang dan kebutuhan pembiayaan, kerentanan fiskal dan faktor risiko, investasi, dan/atau substansi lainnya.

Tahapan Ketiga: Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan

Pada tahapan ini, evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta mengidentifikasi kendala, risiko, dan area perbaikan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menjamin keberlanjutan kebijakan, yaitu upaya untuk memastikan kebijakan dapat dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan manfaat jangka panjang melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung.

Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan);
- Memo Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan.

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:

- Diagnosa Ekonomi Makro terkait perdagangan internasional;
- Ketahanan Fiskal terkait penerimaan negara;
- Beberapa isu ataupun substansi yang akan dibahas antara lain terkait arah kebijakan fiskal Indonesia, realisasi dan proyeksi APBN, stabilitas utang dan kebutuhan pembiayaan, kerentanan fiskal dan faktor risiko, perdagangan internasional dan/atau substansi lainnya.

Tahapan Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik

Pada tahapan ini Transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan, sementara partisipasi publik mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna memberikan masukan, aspirasi, dan perspektif yang beragam dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan serta memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Memo Kebijakan;
- Rancangan Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:

- Diagnosa Ekonomi Makro terkait investasi;
- Ketahanan Fiskal terkait belanja negara
- Beberapa isu ataupun substansi yang akan dibahas antara lain terkait arah kebijakan fiskal Indonesia, realisasi dan proyeksi APBN, stabilitas utang dan kebutuhan pembiayaan, kerentanan fiskal dan faktor risiko, investasi, dan/atau substansi lainnya.

1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

$$\begin{aligned} \text{Nilai Tahapan Ketiga} \\ = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\% \end{aligned}$$

4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Diagnosa Ekonomi Makro dan Ketahanan Fiskal

$$\begin{aligned} \% \text{ efektivitas SKP} &= \text{Nilai Tahapan Pertama} + \text{Nilai Tahapan Kedua} \\ &\quad + \text{Nilai Tahapan ketiga} \\ &\quad + \text{Nilai Tahapan keempat} \end{aligned}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada perkiraan dan target kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2026. Adapun target triwulan sebesar 25% untuk triwulan I, 50% untuk triwulan II, 75% untuk triwulan III, dan 100% untuk triwulan IV.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Persentase Efektifitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Diagnosa Ekonomi Makro dan Ketahanan Fiskal yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 120% atau mencapai 30% dari target Tahun 2026 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU.1.2. Persentase Efektifitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Diagnosa Ekonomi Makro dan Ketahanan Fiskal	Persentase	100%	30%	120%

Diagnosa Ekonomi Makro

Diagnosa Ekonomi Makro pada tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan serta menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, diagnosa ekonomi makro juga bertujuan untuk mendukung keberlanjutan program prioritas nasional. Diagnosa ekonomi makro pada triwulan I tahun 2026 difokuskan pada sisi investasi dan perdagangan internasional, sejalan dengan meningkatnya ketidakpastian global serta isu fragmentasi, serta untuk mendukung tercapainya IKU Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi. Realisasi kinerja Asisten Deputy Ekonomi Makro dan Fiskal pada triwulan I tahun 2026 terselenggara melalui:

1. Koordinasi Isu Ekonomi Makro

- a. Penyiapan Bahan Referensi *World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026*, memuat analisis kondisi dan prospek perekonomian global serta rekomendasi posisi Indonesia dalam forum, sebagai dukungan substansi bagi delegasi Indonesia.
- b. Penyiapan Bahan Referensi Bilateral Indonesia–Italia dan Indonesia–Inggris, memuat analisis komparatif indikator ekonomi makro, peta potensi kerja sama ekonomi, serta peluang penguatan hubungan perdagangan bilateral kedua negara
- c. Penyiapan bahan masukan *Keynote Speech* Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada *Evolution Indonesia Forum*, mencakup analisis perkembangan ekonomi terkini, arah strategi kebijakan, dan proyeksi perekonomian ke depan.
- d. Koordinasi dan pelaporan Evaluasi Program PROSPERA Phase 1 (*Australia–Indonesia Partnership for Economic Development*), dalam rangka menilai capaian program secara komprehensif dan mengidentifikasi pembelajaran strategis bagi perencanaan program selanjutnya
- e. Koordinasi Rapat Interdepartemen Pemutakhiran Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN 2026, mencakup proyeksi pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar Rupiah, suku bunga, *Indonesian Crude Price (ICP)*, dan lifting migas, sebagai acuan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran nasional

2. Identifikasi Investasi Indonesia

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi lapangan atas dampak makroekonomi dan fiskal dari masuknya investasi asing pada sektor industri kendaraan listrik, mencakup kunjungan langsung ke fasilitas produksi PT VinFast Automobile Indonesia di Kabupaten Subang, guna memperoleh gambaran empiris kontribusi investasi industri strategis terhadap pertumbuhan ekonomi dan penerimaan fiskal daerah

3. Analisis Data Perdagangan Internasional

Penyelenggaraan *Forum Group Discussion (FGD)* bertemakan Rekalibrasi Strategi Perdagangan Indonesia di Tengah Perubahan Arah Kebijakan Perdagangan Global pada 19 Februari 2026, menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi serta penanggap dari Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Luar Negeri, guna merumuskan

rekomendasi strategis atas respons kebijakan Indonesia dalam menghadapi perubahan lanskap perdagangan internasional.

4. **Leading Economic Indicator (LEI)**

Pengumpulan data konsumsi listrik nasional secara berkala dari PT PLN (Persero) untuk periode Januari hingga Maret 2026, sebagai komponen dalam konstruksi dan pemutakhiran *Leading Economic Indicator* (LEI) bulanan yang difungsikan sebagai proksi indikator aktivitas ekonomi terkini.

Ketahanan Fiskal

Ketahanan Fiskal pada tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, ketahanan fiskal juga bertujuan untuk mendukung keberlanjutan program prioritas nasional. Upaya ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan kajian kebijakan pada triwulan I tahun 2026, dengan beberapa area yaitu:

1. **Optimalisasi Penerimaan Negara di Bidang Perpajakan**

a. Penyesuaian ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

Kebijakan ini muncul atas dasar hasil rapat yang dipimpin Menko Bidang Perekonomian tanggal 5 Desember 2025 yang menyepakati pemberian dukungan perpajakan dalam rangka restrukturisasi BUMN. Peraturan ini memberikan kemudahan transformasi BUMN melalui restrukturisasi, dalam rangka mendukung dan pencapaian misi BUMN dan Asta Cita Pemerintah RI. Laporan hasil kebijakan telah dikirimkan melalui Nota Dinas nomor EKM.01.06/7/D.II.M.EKON.6/1/2026 pada 28 Januari 2026. Regulasi terkait telah terbit sebagai PMK Nomor 1 Tahun 2026.

b. PPN atas penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi pada periode libur Idulfitri 1447 H yang ditanggung pemerintah

Kebijakan PPN DTP angkutan udara disiapkan untuk mendukung mobilitas masyarakat pada periode libur Idul Fitri 1447 H sekaligus menjaga daya beli melalui pengurangan beban pajak pada komponen tarif dasar dan fuel surcharge. Penyampaian PMK terkait telah dilakukan melalui Nota Dinas Nomor EKM.01.05/13/D.II.M.EKON.6/2/2026 tanggal 13 Februari 2026. Regulasi terkait telah terbit sebagai PMK Nomor 4 Tahun 2026.

c. PPN yang ditanggung pemerintah dalam rangka pemberian sumbangan Bencana Sumatera TA 2026

Kebijakan ini diterbitkan untuk melaksanakan amanat presiden terkait pembebasan pajak atas sumbangan pakaian dari pengusaha Kawasan Berikat bagi korban bencana alam di Sumatera pada akhir 2025. Melalui PMK Nomor 5 Tahun 2026, pemerintah memberikan fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah sebesar 100% atas sumbangan yang diserahkan oleh pengusaha Kawasan Berikat dan/atau pengusaha di Kawasan Berikat kepada Kementerian Dalam Negeri. Laporan telah disampaikan melalui Nota Dinas Nomor EKM.01.05/18/D.II.M.EKON.6/2/2026 tanggal 21 Februari 2026.

d. PPh Pasal 21 DTP atas penghasilan peserta pemagangan lulusan perguruan tinggi TA 2026

Kebijakan ini untuk mendukung pelaksanaan program pemagangan bagi lulusan perguruan tinggi sebagai salah satu upaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, menyiapkan lulusan baru perguruan tinggi memasuki dunia kerja, dan meningkatkan peluang kesempatan kerja, serta memberikan stimulus ekonomi bagi peserta magang. Laporan telah disampaikan melalui Nota Dinas nomor EKM.01.05/19/D.II.M.EKON.6/2/2026 pada 21 Februari 2026. Regulasi terkait telah terbit sebagai PMK Nomor 6 Tahun 2026.

e. Perlakuan perpajakan pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dengan kontrak bagi hasil *gross split*

Rapat harmonisasi dilakukan pada tanggal 7 Januari 2026, merupakan Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017. Perubahan dilaksanakan untuk perbaikan *fiscal term* hulu migas. Perluasan insentif diberikan seiring penguatan governance dan mendukung penurunan emisi. Materi perubahan terdiri dari perluasan fasilitas *indirect taxes* pada rezim *gross split* sejak produksi komersial sampai kontrak berakhir.

f. Kebijakan kepabeanan dan cukai untuk menjaga penerimaan sekaligus melindungi industri dalam negeri.

Beberapa agenda kepabeanan dan cukai pada TW I-2026 mencakup harmonisasi RPKM mengenai impor/ekspor sementara atas returnable package, pengenaan BMAD atas BOPET dari India, RRT, dan Thailand, BMAD atas kertas karton dupleks dari Republik Korea, Malaysia, dan Taiwan, BMADS produk hot rolled coil/canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, serta perubahan PMK Nomor 82 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai. Agenda BMAD BOPET telah dilaporkan melalui Nota Dinas Nomor EKM.01.01/17/D.II.M.EKON.6/2/2026 tanggal 18 Februari 2026.

g. Kebijakan tata cara pemungutan, pemotongan, dan penyetoran pajak rokok

Kebijakan ini merupakan pengganti dari PMK Nomor 143 Tahun 2023 tentang tata cara pemungutan, pemotongan, dan penyetoran pajak rokok. Pengaturan yang lebih rinci ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman yang lebih jelas bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penganggaran dan penandaan belanja yang bersumber dari Pajak Rokok. Laporan ini telah disampaikan melalui Nota Dinas Nomor EKM.01.01/35/D.II.M.EKON.6/3/2026 tanggal 30 Maret 2026.

h. Koordinasi penerimaan perpajakan lainnya

Rapat koordinasi lainnya mencakup pembahasan insentif otomotif 2026, pelaksanaan Sistem *Gateway* Penerimaan Negara (SGPN) dan Sistem *Dashboard* Penerimaan Negara (SDPN), permohonan konfirmasi keberlanjutan insentif fiskal bagi penanam modal, serta penyiapan insentif fiskal untuk mendorong konservasi energi. Dari sisi pajak daerah, terdapat juga laporan harmonisasi RPermendagri tentang dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak alat berat melalui Nota Dinas Nomor EKM.01.01/12/D.II.M.EKON.6/2/2026 tanggal 11 Februari 2026.

2. Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

a. Jenis dan tarif PNBP yang bersifat volatil pada semua instansi pengelola PNBP

Pada 19 Januari 2026 dilakukan rapat pengharmonisasian RPMK mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP yang bersifat volatil yang berlaku pada semua instansi pengelola PNBP. Agenda ini ditujukan untuk memperkuat fleksibilitas penetapan tarif PNBP terhadap jenis penerimaan yang nilainya dapat berubah cepat mengikuti dinamika pasar, biaya layanan, maupun kondisi sektoral.

b. Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (BLU RSPAD) Gatot Soebroto pada Kementerian Pertahanan

Pada 6 Februari 2026 dilaksanakan rapat pleno pengharmonisasian RPMK mengenai tarif layanan BLU RSPAD Gatot Soebroto pada Kementerian Pertahanan. Pengaturan tarif layanan BLU diperlukan untuk memperkuat akuntabilitas, kualitas layanan, dan kontribusi PNBP tanpa mengabaikan prinsip pelayanan publik. Regulasi terkait telah terbit sebagai PMK Nomor 20 Tahun 2026.

c. PNBP terkait pembinaan dan pengawasan profesi keuangan di lingkungan Kementerian Keuangan

Pada 26 Januari 2026 dilakukan rapat pleno pengharmonisasian RPMK tentang jenis dan tarif PNBP kebutuhan mendesak terkait pembinaan dan pengawasan profesi keuangan di lingkungan Kementerian Keuangan. Kebijakan ini mendukung penguatan basis penerimaan dari layanan perizinan, persetujuan, dan denda administratif di bidang profesi keuangan. Regulasi terkait telah terbit sebagai PMK Nomor 33 Tahun 2026.

d. Perubahan tarif layanan BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) pada Kementerian Keuangan

Pada 26 Februari 2026 dilaksanakan rapat harmonisasi RPMK tentang Perubahan atas PMK Nomor 69 Tahun 2025 mengenai tarif layanan BLU BPDP pada Kementerian Keuangan. Kebijakan ini memperkuat pengelolaan layanan BLU dan kesinambungan pendanaan sektor perkebunan. Regulasi terkait telah terbit sebagai PMK Nomor 9 Tahun 2026.

e. PNBP Kementerian Hukum dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) K/L

Sepanjang Maret 2026 dilakukan beberapa rapat lanjutan Panitia Antarkementerian (PAK) penyusunan RPP tentang jenis dan tarif PNBP yang berlaku pada Kementerian Hukum, termasuk pembahasan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Selain itu, pada 12 Maret 2026 dilakukan koordinasi kebijakan umum penyusunan RPP jenis dan tarif PNBP K/L. Agenda tersebut penting untuk memperluas basis PNBP, memperkuat tata kelola tarif, dan memastikan prinsip *cost recovery* yang tetap seimbang dengan akses layanan publik.

3. Peningkatan Tata Kelola pada Belanja Negara dan Transfer ke Daerah

a. Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik.

Harmonisasi dilaksanakan pada 12,18, dan 20 Januari 2026. Pengaturan ini diarahkan untuk memperkuat perencanaan, penyaluran, dan akuntabilitas DAK Fisik agar belanja transfer lebih tepat sasaran serta mendukung prioritas pembangunan daerah. Selain itu mengatur Penyesuaian pengaturan mekanisme penganggaran DAK Fisik pada tahun berjalan berdasarkan direktif Presiden. Regulasi terkait telah terbit sebagai PMK Nomor 25 Tahun 2026.

b. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.

RPMK Pengelolaan DBH Perkebunan Sawit disusun untuk menggantikan PMK Nomor 91 Tahun 2023 sebagai tindak lanjut rekomendasi BPK dan penguatan tata kelola DBH sawit. Penyempurnaan diarahkan pada penyelarasan siklus DBH sawit dengan APBD, penajaman bidang/kegiatan/subkegiatan, serta pemberian fleksibilitas bagi daerah dalam penggunaan DBH sawit untuk kegiatan utama dan pendukung. Laporan telah disampaikan melalui ND Nomor EKM.01.01/11/D.II.M.EKON.6/2/2026 tanggal 9 Februari 2026 dan ND Nomor EKM.01.03/30/D.II.M.EKON.6/3/2026 tanggal 9 Maret 2026. Regulasi ini telah terbit sebagai PMK Nomor 10 Tahun 2026.

c. Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBA SDA) Kehutanan Dana Reboisasi.

Rapat harmonisasi RPMK tentang Penggunaan DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi dilaksanakan pada 26 Januari 2026. Laporan hasil rapat telah disampaikan melalui Nota Dinas Nomor EKM.01.03/9/D.II.M.EKON.6/2/2026 tanggal 3 Februari 2026. Kebijakan ini penting untuk memperbaiki pemanfaatan sisa dana reboisasi dan memperkuat keselarasan penggunaan DBH dengan prioritas lingkungan hidup dan pembangunan daerah. Regulasi terkait telah terbit sebagai PMK Nomor 16 Tahun 2026.

d. Penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau.

Pada 23 Januari 2026 dilakukan rapat pleno pengharmonisasian RPMK mengenai rincian alokasi DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2026. Pada 2 Februari 2026 juga dilaksanakan rapat harmonisasi RPMK terkait DBH CHT. Agenda ini diperlukan untuk memastikan kepastian alokasi, penggunaan, dan pemantauan DBH CHT oleh daerah. Regulasi terkait telah terbit sebagai PMK Nomor 12 Tahun 2026 dan PMK Nomor 22 Tahun 2026.

e. Pengelolaan DBH dan Dana Alokasi Umum (DAU), termasuk penyaluran nontunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*.

Rapat harmonisasi RPMK tentang pengelolaan DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility* dilaksanakan pada 22 Januari 2026. Selain itu, pada 9 dan 16 Maret 2026 dilakukan rapat harmonisasi RPMK tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. Kebijakan ini mendukung penguatan tata kelola transfer ke daerah, pengendalian kas, dan akuntabilitas penyaluran. Regulasi terkait telah terbit sebagai PMK Nomor 30 Tahun 2026 dan PMK Nomor 35 Tahun 2026.

f. Kebijakan transfer daerah dan pinjaman PEN daerah untuk daerah terdampak bencana Sumatera

Pada 26 Maret 2026 dilakukan rapat pleno pengharmonisasian RPMK tentang Perubahan PMK Nomor 102 Tahun 2025 mengenai kebijakan transfer daerah TA 2025 dan 2026 untuk percepatan penanganan pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Agenda ini diarahkan untuk mempercepat dukungan fiskal pusat kepada daerah terdampak bencana, baik melalui fleksibilitas transfer maupun dukungan pembiayaan pemulihan. Regulasi terkait telah terbit sebagai PMK Nomor 29 Tahun 2026.

g. THR dan gaji ketiga belas TA 2026

Pada 23 Februari 2026 dilakukan rapat pleno pengharmonisasian RPMK tentang petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran THR dan gaji ketiga belas yang bersumber dari APBN. Kebijakan ini mendukung pemenuhan kewajiban belanja pegawai sekaligus menjaga daya beli aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan. Regulasi terkait telah terbit sebagai PMK Nomor 13 Tahun 2026.

h. Subsidi pupuk, RKP 2026, dan tata kelola belanja lainnya

Agenda tata kelola belanja lainnya mencakup harmonisasi RPMK tentang perubahan ketentuan penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana subsidi pupuk pada 11 Maret 2026; harmonisasi RPerpres tentang pemutakhiran RKP 2026 pada 13 Maret 2026; serta agenda lintas belanja seperti standardisasi kompetensi teknis pejabat perbendaharaan pengelola APBN, pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, pemusnahan/penghapusan BMN, pelaksanaan APBN, serta pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia.

4. Pembiayaan dan Investasi Pemerintah

a. Perubahan atas PP Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah

Pembahasan RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah dilakukan beberapa kali pada triwulan I-2026, yaitu 20 Januari, 28 Januari, 6 Februari, dan 23 Februari 2026. Agenda ini strategis untuk memperkuat kerangka investasi pemerintah, tata kelola penempatan dana, serta dukungan pembiayaan pembangunan yang lebih akuntabel dan berorientasi manfaat ekonomi.

b. Dana kerja sama pembangunan internasional

Pada 3 Maret 2026 dilakukan rapat harmonisasi RPMK tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional. Pengaturan ini bertujuan memperjelas tata kelola dana kerja sama pembangunan internasional, mulai dari perencanaan, pengelolaan, penyaluran, hingga pertanggungjawaban sehingga dapat mendukung diplomasi ekonomi dan kepentingan pembangunan nasional.

c. Lembaga Wali Amanat Dana Pembangunan Inovatif

Pada 4 Maret dan 31 Maret 2026 dilakukan pembahasan RPermen PPN/Kepala Bappenas terkait pembentukan Lembaga Wali Amanat Dana Pembangunan Inovatif. Agenda ini diarahkan untuk memperkuat alternatif pembiayaan pembangunan yang lebih inovatif, transparan,

dan dapat menghimpun sumber pendanaan dari berbagai pemangku kepentingan.

d. Kepemilikan asing pada penyelenggara usaha jasa pembiayaan

Dalam periode TW I-2026 juga terdapat penyampaian usulan anggota Panitia Antarkementerian dan/atau nonkementerian untuk penyusunan RPP tentang kepemilikan asing pada penyelenggara usaha jasa pembiayaan melalui Nota Dinas Nomor PK.PL/15/D.II.M.EKON.6/2/2026 tanggal 13 Februari 2026. Agenda ini memiliki keterkaitan dengan iklim pembiayaan, stabilitas sektor jasa keuangan, dan perlindungan kepentingan nasional.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.2. Persentase Efektifitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Diagnosa Ekonomi Makro dan Ketahanan Fiskal			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Koordinasi dan penyusunan Diagnosa Ekonomi Makro berkaitan dengan perdagangan internasional & investasi	Terlaksana	Telah dilaksanakan Koordinasi dan penyusunan Diagnosa Ekonomi Makro berkaitan dengan perdagangan internasional & investasi
2.	Koordinasi dan penyusunan Ketahanan Fiskal berkaitan dengan belanja negara	Terlaksana	Telah disusun dan disampaikan kepada Menko Perekonomian serta disebarluaskan kepada stakeholders terkait

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *capacity building* dan *focus group discussion* (FGD) dalam rangka pembinaan peningkatan kemampuan analisa perkembangan ekonomi makro dan kebijakan fiskal, terutama yang berhubungan dengan dinamika ekonomi terkini.
2. Penyampaian rekomendasi kebijakan perkembangan ekonomi terkini dan rekomendasi kebijakan ketahanan fiskal kepada Menko Perekonomian.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya rapat dilaksanakan menggunakan *zoom meeting* dengan mengundang narasumber yang ahli dibidangnya sehingga menambah ilmu dan wawasan bagi para pegawai di

lingkup Asdep Ekonomi Makro dan Fiskal. Selain itu, penyimpanan dan dokumen serta keperluan administrasi persuratan menggunakan e-dokumen sehingga seluruh staf di asdep EMF dapat bekerja secara *real time*, efektif dan efisien.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Keterbatasan informasi dan koordinasi terkait implementasi pertumbuhan ekonomi dan kebijakan fiskal secara langsung, karena tugas dan fungsi dikoordinasikan oleh unit lain.
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam mengolah data-data ekonomi terkini untuk disajikan sebagai bahan analisis kebijakan ekonomi.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Merealisasikan seluruh program dan kegiatan sesuai target dalam rencana aksi Triwulan II Tahun 2026.
2. Menghasilkan dan menerbitkan dokumen rekomendasi analisis kebijakan terkait diagnosis ekonomi makro dan ketahanan fiskal secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan pemangku kepentingan.

2

Sasaran Kegiatan 2. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal

Pencapaian Sasaran Strategis 2: Terwujudnya kebijakan Bidang Perekonomian yang efektif merupakan sasaran strategis perspektif internal *business process* yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif stakeholder yang ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu: Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1.1. Indeks Kepuasan Latar Belakang

Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal

Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal yang mencakup: a) penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang ekonomi makro, ekonomi daerah dan fiskal; b) perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang ekonomi makro, ekonomi daerah dan fiskal; c) pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang ekonomi makro, ekonomi daerah dan fiskal; d) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ekonomi

makro, ekonomi daerah dan fiskal; dan e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh deputi.

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal mengukur indikator tingkat kepuasan pelayanan Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal dengan melakukan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survey ini mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan meliputi: ketanggapan dalam pelayanan (*responsiveness*), kehandalan dalam pelayanan (*reliability*), sarana dan prasarana fisik (*tangible*), kepastian dalam pelayanan (*assurance*), dan sikap dalam pelayanan (empati); dan (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan meliputi: koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, pengendalian pelaksanaan kebijakan, pengelolaan dan penanganan isu, penyelesaian isu di bidang perekonomian, dan pengawalan program prioritas nasional. Survey akan dilakukan dengan menggunakan Google Form. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:

Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi

$$\text{Sinkronisasi dan Pengendalian} = \frac{\sum \text{Jumlah dari masing – masing item survey}}{\text{Jumlah Item Survey}}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 3 dari 4. Penetapan target 3 atau “puas” tahun 2026 ditetapkan untuk memastikan bahwa penerima layanan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian di bidang ekonomi makro dan fiskal dapat mendapatkan pelayanan yang terbaik sesuai harapan. Adapun target triwulan sebesar 3 dari 4, atau setidaknya dapat mempertahankan capaian triwulan-triwulan sebelumnya.

Hingga triwulan I tahun 2026, indeks kepuasan layanan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian di bidang ekonomi makro dan fiskal mencapai telah terealisasi sebesar 3 dari 4 atau mencapai 100% dari target Tahun 2026 sebesar 3 dari 4 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal	Indeks	Puas (3 dari 4)	Puas (3 dari 4)	100%

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal merupakan *cascading direct* dari Indikator Indeks Kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dengan target tahun 2026 sebesar Puas (3 dari 4). Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal ini diharapkan mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas terkait *puas* terhadap layanan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian yang dilakukan.

Realisasi capaian Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal yang tercapai pada triwulan I didorong oleh koordinasi yang efektif antar pegawai di Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal dengan stakeholder terkait. Proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian bidang ekonomi makro dan fiskal masih terus dilaksanakan, maka diprediksikan indeks kualitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di bidang ekonomi makro dan fiskal akan terus stabil sehingga target tahun 2026 dapat terpenuhi. Dengan mempertahankan koordinasi yang baik tersebut, diperkirakan target tahunan akan tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

2.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Persiapan Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian	Terlaksana	Persiapan Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal telah terlaksana
2.	Penguatan substansi kuisiонер survey yang lebih mudah dipahami responden	Terlaksana	Penguatan substansi kuisiонер survey yang lebih mudah dipahami responden telah dilaksanakan

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya penggunaan *Google Form* sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp345.000,00. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk belanja bahan sebagai pengunjang kebutuhan keasdepan selanjutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, antara lain: (1) keterbatasan waktu dalam penyusunan kegiatan, (2) hasil survei yang belum dapat segera ditindaklanjuti, dan (3) tingginya tingkat kesibukan responden sehingga memengaruhi ketepatan waktu pengisian survei.

Sebagai upaya untuk mengatasi kendala tersebut dan mendukung pencapaian target kinerja pada periode berikutnya, akan dilakukan beberapa langkah perbaikan, yaitu menyusun perencanaan kegiatan yang lebih matang melalui penyusunan timeline secara rinci, membangun mekanisme tindak lanjut hasil survei yang lebih terstruktur, serta memberikan fleksibilitas waktu pengisian survei dalam rentang periode tertentu agar tingkat partisipasi responden dapat meningkat.

3

Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputy Ekonomi Makro dan Fiskal yang Profesional

Pencapaian Sasaran Strategis 3: Terwujudnya kebijakan Bidang Perekonomian yang efektif merupakan sasaran strategis perspektif internal *business process* yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif stakeholder yang ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu: Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputy Ekonomi Makro dan Fiskal.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputy Ekonomi Makro dan Fiskal

Latar Belakang

Terwujudnya tata kelola Asisten Deputy Ekonomi Makro dan Fiskal yang profesional merupakan sasaran strategis yang berfokus pada Perspektif Learning and Growth dan merupakan turunan dari sasaran strategis Perspektif *Learning and Growth* level kedeputian yakni Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Profesional. Ketercapaian sasaran strategis ini akan mendukung terwujudnya pelaksanaan proses bisnis yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang efektif di lingkungan Asisten Deputy Ekonomi Makro dan Fiskal yang profesional.

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputy Ekonomi Makro dan Fiskal merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputy Ekonomi Makro dan Fiskal.

Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Asisten Deputy didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Asisten Deputy Ekonomi Makro dan Fiskal. Implementasi kegiatan RB General dan/ atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Adapun Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputy Ekonomi Makro dan Fiskal sebagai berikut:

Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
	TW I	TW II	TW III	TW IV
Optimalisasi Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputy Ekonomi Makro dan Fiskal Tahun 2026	• Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Manual IKU • Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan • Penyusunan Renja 2026 • Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI	• Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan • Penyusunan Revisi Renja 2026 • Optimalisasi Pemanfaatan Srikandi	• Penyusunan dan Penetapan Tim Kerja • Penyusunan Matriks Manajemen Risiko • Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan • Penyusunan TOR dan RAB atas Revisi Renja 2026 • Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI	• Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan • Penyusunan Draft Perjanjian Kinerja Tahun 2027 • Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI • Pengisian <u>Survey</u> Penilaian Integritas (SPI)

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputy Ekonomi Makro dan Fiskal dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan/atau RB Tematik di Asisten Deputy Ekonomi Makro dan Fiskal dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Asisten Deputy Ekonomi Makro dan Fiskal:

$$\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 92% penetapan target tahun 2026 didasarkan pada rencana aksi Asisten Deputy Ekonomi Makro dan Fiskal tahun 2026 yang berpedoman pada manual IKU. Untuk target capaian pelaksanaan renaksi RB tahun 2026 didasarkan pada dokumen manual IKU yang telah disepakati bersama yaitu sebesar 92%.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputy Ekonomi Makro dan Fiskal yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 100% atau mencapai 20% dari target Tahun 2026 sebesar 92% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputy Ekonomi Makro dan Fiskal	Persentase	92%	20%	100%

Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputy Ekonomi Makro dan Fiskal merupakan *cascading direct* dari indikator persentase pemenuhan dokumen yang menjadi bukti pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputy Ekonomi Makro dan Fiskal yang pada tahun 2026 ditargetkan sebesar 92%. Sampai dengan laporan ini disusun, persentase pemenuhan dokumen yang menjadi bukti pelaksanaan RB Asisten Deputy Ekonomi Makro dan Fiskal sudah berjalan sesuai dengan rencana aksi yang disusun pada awal tahun dan telah disepakati bersama. Terdapat tiga inisiatif strategis yang mendasari pemenuhan dokumen pelaksanaan RB Asisten Deputy Ekonomi Makro dan Fiskal, antara lain:

- a) Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Manual IKU
- b) Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan
- c) Penyusunan Renja 2026
- d) Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI

Keempat inisiatif strategis didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi RB General dan/atau RB Tematik di lingkungan Asisten Deputy Ekonomi Makro dan Fiskal. Selain itu, inisiatif strategis ini dipetakan berdasarkan jumlah minimum IKU RB yang wajib didukung pada level keasdepan. Pada triwulan I-2026, fokus pelaksanaan RB dilakukan pada inisiatif (1) terlaksananya penyusunan dan penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Manual IKU; (2) terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan; (3) terlaksananya penyusunan Renja 2026; dan (4) terlaksananya Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI.

Dalam rangka mendukung implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputy Ekonomi Makro dan Fiskal, berbagai inisiatif strategis telah dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola organisasi, peningkatan akuntabilitas kinerja, serta optimalisasi pelayanan administrasi. Salah satu fokus utama adalah penyusunan dan penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, dan Manual IKU sebagai landasan pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus instrumen pengukuran kinerja unit kerja. Proses penyusunannya dilakukan melalui koordinasi internal, penyelarasan dengan dokumen perencanaan dan kebijakan yang lebih tinggi, serta penyesuaian terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan agar sasaran dan target kinerja dapat diukur secara jelas dan akuntabel.

Selanjutnya, penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan. Penyusunan laporan diawali dengan pengumpulan data realisasi kinerja dari masing-masing penanggung jawab kegiatan, dilanjutkan dengan proses verifikasi, analisis capaian indikator kinerja, identifikasi faktor pendukung dan kendala, serta penyusunan rekomendasi tindak lanjut sebagai dasar perbaikan kinerja pada periode berikutnya. Laporan tersebut menjadi instrumen evaluasi yang mendukung pengambilan keputusan serta memastikan pelaksanaan program tetap sejalan dengan target yang telah ditetapkan.

Pada aspek perencanaan, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 dilakukan melalui identifikasi kebutuhan program dan kegiatan, penelaahan

prioritas pembangunan nasional, serta penyelarasan dengan arah kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Proses penyusunan juga melibatkan koordinasi dengan unit-unit terkait untuk memastikan keselarasan antara sasaran strategis, indikator kinerja, target capaian, dan kebutuhan anggaran, sehingga dokumen Renja yang dihasilkan dapat menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Selain itu, optimalisasi pemanfaatan aplikasi SRIKANDI terus didorong sebagai bagian dari implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pemanfaatan aplikasi dilakukan dalam pengelolaan naskah dinas secara elektronik, mulai dari proses surat masuk, surat keluar, disposisi, persetujuan dokumen, hingga pengarsipan. Penerapan SRIKANDI diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses administrasi, mempercepat alur koordinasi, memperkuat akuntabilitas pengelolaan dokumen, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan terdokumentasi dengan baik.

Sampai dengan akhir triwulan I Indikator Kinerja Utama Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Diperkirakan dengan melihat jangka waktu dan hasil yang telah dicapai pada triwulan I, Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal diproyeksikan dapat tercapai di akhir triwulan IV 2026.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Manual IKU	Terlaksana	Dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2026 melalui koordinasi internal, penyusunan draft dokumen, reviu, serta finalisasi dan penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, dan Manual IKU. Kegiatan dilaksanakan di lingkungan Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal.
2.	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	Terlaksana	Dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2026 melalui pengumpulan data capaian kinerja, verifikasi, analisis indikator kinerja,

			penyusunan narasi evaluasi, serta finalisasi laporan. Kegiatan dilaksanakan di lingkungan Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal dengan koordinasi bersama unit terkait.
3.	Penyusunan Renja 2026	Terlaksana	Dilaksanakan melalui identifikasi kebutuhan program dan kegiatan, penyusunan usulan target dan indikator kinerja, serta pembahasan dan sinkronisasi dengan unit terkait. Kegiatan dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2026 di lingkungan Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal.
4.	Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana	Dilaksanakan secara berkelanjutan melalui pemanfaatan aplikasi SRIKANDI dalam pengelolaan surat masuk, surat keluar, disposisi, persetujuan dokumen, dan pengarsipan naskah dinas elektronik di lingkungan Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya adalah:

1. Sebagian pelaksanaan koordinasi dilaksanakan secara hybrid menggunakan media komunikasi telekonferens (*online*) sehingga perjalanan dinas luar kota dilaksanakan selektif sesuai dengan urgensi
2. Pemberkasan administrasi persuratan sudah menggunakan aplikasi Srikandi dan media penyimpanan cloud sehingga sudah tidak memerlukan banyak peralatan ATK seperti kertas ataupun lemari untuk administrasi surat-surat tersebut

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut adalah: (1) Penyesuaian terhadap kebijakan dan pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi memerlukan proses koordinasi dan penyesuaian dalam penyusunan dokumen. (2) Keterbatasan waktu pelaksanaan akibat tingginya beban kerja dan pelaksanaan tugas lain yang bersifat

prioritas. (3) Proses penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan masih memerlukan koordinasi serta sinkronisasi dengan unit kerja terkait, sehingga berpotensi memengaruhi ketepatan waktu penyelesaian. (4) Pemanfaatan aplikasi SRIKANDI belum sepenuhnya optimal sehingga masih diperlukan peningkatan konsistensi dalam penerapan administrasi naskah dinas secara elektronik.

Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai, diantaranya: (1) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan unit terkait untuk mempercepat proses penyusunan, reviu, dan penyelesaian dokumen. (2) Menyusun jadwal dan timeline pelaksanaan kegiatan secara lebih terstruktur agar setiap tahapan pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target. (3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi guna memastikan capaian kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan. (4) Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SRIKANDI melalui peningkatan kepatuhan penggunaan naskah dinas elektronik serta pendampingan bagi pengguna apabila diperlukan.

Jakarta, 6 April 2026

Plt. Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal



Siti Wahyuningrum
NIP 197903252000122001